

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- El Mujtaba. 2022. *Mengenal Fintech: Pengertian, Jenis, dan Aturan Hukumnya..* Elementa Media.
- Harahap, Y. 2021. *Hukum perseroan terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasadungun Sinaga. 2024. *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara
- Muhaimin, M. 2020. *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nani Mulyati. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi Cetakan kedua*. Depok: Rajawali Pers.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. 2020. *Metodologi riset hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.
- Priyatno, D., Kristian. 2017. *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnamaningrum, T. K., Et. Al. 2025. *Teknologi Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Rasyid, W., & Rahma, W. (2026). *Direksi Dalam Sorotan: Kewenangan, Kepatuhan, dan Hak Upah Pekerja*. AMU Press
- Rodliyah, S. H., HS, H. S., & SH, M. 2024. *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO. 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Ruba'i, M. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing
- Rusianto, A, 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media.
- Saifullah, S., Et. Al. 2023. *Hukum fintech lending, upaya mitigasi pinjaman online ilegal*. Bandung: Refika Aditama..
- Saragih, Y. M., Hadiyanto, A., & Prasetyo, M. S. E. 2022. *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: CV. Tungga Esti.
- S E Yoyo Sudaryo Et Al. 2020. *Digital Marketing Dan Fintech Di Indonesia*.

Surabaya: Penerbit Andi.

Sriwidodo, J. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*. Surabaya: CV Global Media.

Sukmana, H. 2022. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni Penerbit Akademik.

Susanti, D. O., & Efendi, A. . 2022. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, A. 2014. *Aspek hukum otoritas jasa keuangan*. Jakarta: RAS.

Yudha, Ana Toni Roby Candra, Et. Al. 2020, *Fintech syariah: Teori dan terapan*. Malang: Penerbit Literasi Nusantara.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumende

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK. 05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jaasa Keuangan Nomor 40/2024 tentang Layanan Pendanaan

Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan
Teknologi Finansial

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK.06/
2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama
Berbasis Teknologi Informasi.

Jurnal

Akobiarek, S. H., *Et..Al.*, 2025. Sanksi bagi Penyelenggara Pinjaman Daring Legal yang Tidak Mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*,

Akobiarek, S. H., *Et..Al.*, 2025. Sanksi bagi Penyelenggara Pinjaman Daring Legal yang Tidak Mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*,

Alin, F. 2017. Sistem pidana dan ppidanaan di dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1),

Ar, Munandar,.Et. Al, 2024. Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. Jimmi: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*. 1(3).

Arafat, M., & Nugraha, S. U. 2026. Tanggung Jawab Direksi–Komisaris Pasca Serangan Siber: Fiduciary Duty dan Business Judgment Rule. *Equality: Journal of Law and Justice*, 3(1), 26-49

Aritamiga, H. F. 2025. Penegakan Hukum Terhadap Desk Collector Fintech Ilegal. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(1), 146-163

Azizah, H. 2026. Tindakan Ultra Vires Pada Perseroan Perorangan yang Menyebabkan Penghapusan Tanggung Jawab Terbatas: Studi Komparatif Dengan Single Member Company (Sdn. Bhd) di Malaysia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 539-551

Baehaqi, E. S. 2022. Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1)

Bisthomi, I., Dwi Irawan, J., & Qisti, L. 2025. Peran Financial Technology Peer-To-Peer (P2p) Lending Dalam Mendukung Pengembangan Umkm Studi

Kasus: Kampoeng Batik Laweyan. *Technology and Economics Law Journal*, 4(1)

- Chandrawan, D., Widjojo, J., & Munir, A. 2023. Financial Technology Peer-To-Peer Lending Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM. *Nilai*, 1(2), 56-65.
- Dewi, N. K. R. K., & Chomsiyah, S. 2023. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Yang Memberikan Perintah Untuk Melakukan Kejahatan. *Jurnal Yusthima*, 3(1), 46-58
- Elvina, T. D., & Sulistiyono, A. 2025. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tindakan Kekerasan Debt Collector Pelaku Pinjaman Online. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 364-376
- Fisabilillah, L. W. P., & Hanifa, N. 2021. Analisis pengaruh fintech lending terhadap perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship, and Innovation*.
- Hura, A. M. B. Y. 2023. Aspek Hukum Terkait Kegiatan Penagihan oleh Debt Collector dalam Kegiatan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 5604-5614.
- Hutagalung, H. B. 2024. Regulasi dan Implementasi Peer To Peer Lending di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 32(6), 441-451
- Johan, S. 2020. Pertanggungjawaban Fiduciary Duty Direksi Perseroan Terbatas. *UNTAR*, 92.
- Kamal, G. M., Prawesthi, W., Marwiyah, S., & Aribawa, M. Y. 2025. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pengguna Jasa Debt Collector dalam Melakukan Penagihan Pinjaman Online. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2366-2387
- Kartika, N., Alya, Z., Salsabila, N., Azahra, L., & Sianturi, S. G. I. 2026. Kajian Hukum tentang Pengawasan Dan Pengendalian Internal Dalam Perseroan Terbatas. *Warta Dharmawangsa*, 20(1), 96-101.
- Kurnianto, M. D. S., Rahardiansyah, T., & Notoprayitno, M. I. 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Pinjaman Online Berbasis Fintech Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Empiris Terhadap Implementasi Regulasi Perlindungan Konsumen. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(7), 192-213.
- Kurniawan, K. D., & Hapsari, D. R. I. 2022. Pertanggungjawaban pidana korporasi

menurut vicarious liability theory. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 29(2).

- Kusumawardani, S. I. 2013. Pengaturan kewenangan, dan tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas (studi perbandingan Indonesia dan Australia). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(1),
- Maknun, L. 2024. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 30(1), 21-28
- Muslikin, S. H. K., Frederik, W., & Lengkong, 2025. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberantas Pinjaman Online (Fintech) Ilegal Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Vol 5. No. 4.
- Njatrijani, R. 2019. Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 3(1).
- Njoto, D. L. B, 2024, Rekonstruksi asas actus non facit reum nisi mens rea dalam tindak pidana. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. 7(3).
- Nurhisyam, F., Sudir, A. A., & Machmud, A., 2024. Analisis Penerapan Kode Etik Penagihan Pada Fintech P2P Lending Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, *Syntax Idea*, 6(2).
- Nursukma, D. P. 2024. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan good corporate governance terhadap financial technology di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 87-99.
- Prasetio, A., & Adhari, A. 2020. Analisis Keadilan Dalam Pemidanaan Atas Penyebaran Data Pribadi Debitur Pada Penagihan Pinjaman Teknologi Finansial (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid. Sus/2020/Pn Jkt. Utr). *Prosiding*, 1.
- Prasetyo, H. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Debt collector yang Melakukan Penyebaran Data Pribadi Pengguna Fintech Ditinjau dari Pasal 26 UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik. *Law Studies*. 2(1).
- Prakasa, A. W., & Sudarwanto, A. S. (2025). Doktrin Fiduciary Duty: Peranannya sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi. *Al-*

Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2),

- Purnawan, K. W. (2026). Business Judgment Rule Dan Pertanggungjawaban Pidana Direksi Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(2).
- Purwanto, H., Yandri, D., & Yoga, M. P. 2022. Perkembangan dan dampak financial technology (fintech) terhadap perilaku manajemen keuangan di masyarakat. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11(1), 80-91.
- Putra, K. S. W. 2024. Kedudukan Para Pihak Dalam Aktivitas Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 60-69
- Putra, N. R. 2025. Analisis Hukum Tanggung Jawab Direksi atas Tindakan Ultra Vires pada Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Rahmadhani, A., Damanik, I. M. S., Batubara, A. R., Adib, M. F., & Nabil, N. (2025). Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 2(1)
- Rahmawati, D. 2024. Pengaturan Hukum Terkait Penggunaan Telepon pada Penagihan Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 212-230
- Retnowinarni, R. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 82-104
- Sakina, P. Y., Fikri, R. A., & Sahlepi, M. A. 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerasan dan atau Pengancaman dalam Penagihan Pinjaman Online (Analisis Putusan Nomor 438/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Utr). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 6905-6918.ser
- Setyarini, D. M., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1),
- Setyarini, D. M., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D. 2020. Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal nalogi Hukum*. 2(1).
- Susanto, E. 2025. Manajemen Risiko Kredit Perusahaan Fintech Lending Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Nomor 19/SEOJK. 06/2023. *Khozana: Jurnal*

Ekonomi dan Perbankan Islam, 9(1),

Sushanty, V. R. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Gorontalo Law Review*. 3(1).

Tatika, F., Khafifah, A., Setyawan, F., & Adonara, F. F. 2025. Tanggung Jawab Pribadi Direksi Atas Wanprestasi Fintech Terhadap Pinjaman Berdasarkan Analisis Pasal 97 (3) Undang-Undang PT. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 23(2), 75-85.

Tomayahu, F., Thalib, M. C., & Moha, M. R. 2026. Pertanggungjawaban Direksi UMKM Berbentuk Perseroan Perorangan Ketika Terjadi Pailit. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1)

Utomo, A. M., Sukarja, D., Leviza, J., & Azwar, T. K. D. 2024. Kewenangan Hak Kreditur Pinjaman Online Terhadap Data Debitur Untuk Kepentingan Penagihan Utang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1).

Wahyuni, S, 2024. Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. 4(3).

Yasmine, A. F., Faradila, A., Pranchastika, A., Almi, F., Rafli, M., Ayunda, M., ... & Rizky, D. 2023. Dampak Pengancaman Tindak Pidana Desk Collector Terhadap Debitur Pinjaman Online Menurut Lifestyle Routine Activity Theory. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(2),

Yusuf, M. 2020. Batasan Makna tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas. *Jurnal Mutiara Hukum*. 3(2).

Skripsi/Tesis/Disertasi

Fuady, M. A., 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Debt Collector Pinjaman Online Atas Ancaman Kekerasan Melalui Media Digital (Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Doctoral dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ajie, I. W. 2013. *Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Karyawan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).

- Shafira, P. A., 2024. *Implementasi POJK Nomor 10/POJK. 05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Finansial Tteknologi Peer To Peer Lending di Indonesia (Studi Kasus di PT Alami Fintek Sharia)*. Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syukur,R.A. 2024. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyertaan Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)

Dokumen Lain

- Iman, N. 2016. Financial technology dan lembaga keuangan. *Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta.

Internet

- Ade Winata. Fiduciary Duty Direksi: Panduan Lengkap Kewajiban dan Tanggung Jawab 2025. <https://advokatbatam.com/fiduciary-duty-direksi-panduan-lengkap-2025> . Diakses pada tanggal 16 Februari 2026. Pukul 22.17.
- Agnes.Z. Nilai Penyaluran Pinjol Capai Rp27 Triliun per Maret 2025. <https://goodstats.id/article/nilai-penyaluran-pinjol-capai-rp27-triliun-per-maret-2025-xN1hl/> . Diakses pada 12 Oktober 2025. Jam 22.05
- BBC News. Pinjol AdaKami Diduga Teror Nasabah Karena Telat Membayar Cicilan-‘Saya dibilang anak haram, orangtua dimaki dengan kasar’. [Pinjol: AdaKami diduga teror nasabah karena terlambat bayar cicilan - 'Saya dibilang anak haram, orangtua dimaki dengan kasar' - BBC News Indonesia](#). Dikunjungi pada tanggal 28 Januari 2026. Pukul 21.48 wib.
- Cita Auliana. Ada 3.858 Aduan Masyarakat Soal OJK. <https://wartaekonomi.co.id/read577437/ada-3858-aduan->

[masyarakat-soal-debt-collector-pinjol-ini-respon-ojk](#). Diakses pada
20 Oktober 2025 Jam 21.23

Dwi Bowo Raharjo <https://amp.suara.com/news/2021/11/12/183649/pegawai-pinjol-ilegal-lakukan-ancaman-ke-nasabah-dikendalikan-dari-china>.

Diakses pada tanggal 15 Maret 2026. Pukul 14.02 wib.

Mentari Puspadini. Polisi bekuk 2 jaringan pinjol ilegal! Korban 400 orang, rugi miliaran. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20251121103726-17-687356/polisi-bekuk-2-jaringan-pinjol-ilegal-korban-400-orang-rugi-miliaran>. Dikunjungi pada 28 Januari 2026. Pukul 21.06.

Otoritas Jasa Keuangan. Faq:Kagori Umum. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>. Dikunjungi pada tanggal 25 Januari 2026 Pukul 15.41 wib

Senja Kinanti. [Perspektif Petugas OJK: Kasus Pinjol yang Sering Ditangani Januari 2026 - Rsidsubki.id](#). diakses pada tanggal 26 Februari 2026. Pukul 13.04.

Siti Yona Hukmana. 1 Keluarga Tewas terkait Pinjo, Diduga Karena Tak Berdaya Melawan Intimidasi. [1 Keluarga Tewas terkait Pinjol, Diduga karena Tak Berdaya Melawan Intimidasi](#). Dikunjungi pada 28 Januari 2026. Pukul 21.28.